



DISKOMINFOSTASAN
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Laut

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib membuat laporan keterangan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini di masa mendatang. Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19840320 200212 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18
2.1 Urusan Wajib	18
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	44
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	45
4.1 Kerjasama Daerah.....	45
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan.....	47

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.2.1	Tabel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan.....	9
Tabel 1.2.2	Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.....	10
Tabel 2.1.2	Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2024.....	19
Tabel 2.1.3	Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.....	24
Tabel 2.1.4	Tabel alokasi dan realisasi Tahun 2024.....	28
Tabel 2.1.5	Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.....	32
Tabel 2.1.6	Tabel Permasalahan dan solusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.....	40
Tabel 2.1.7	Tabel Kebijakan strategis yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.....	41
Tabel 2.1.8	Tabel Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut merupakan SKPD yang baru dibentuk pada awal Tahun 2017 yang sebelumnya merupakan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308).

Maka berdasarkan perkembangan yang ada sejak tanggal 03 Januari 2017, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut mulai menjalankan roda organisasi karena pada tanggal tersebut baru dilantiknya pejabat di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ dan LPPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
6. PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

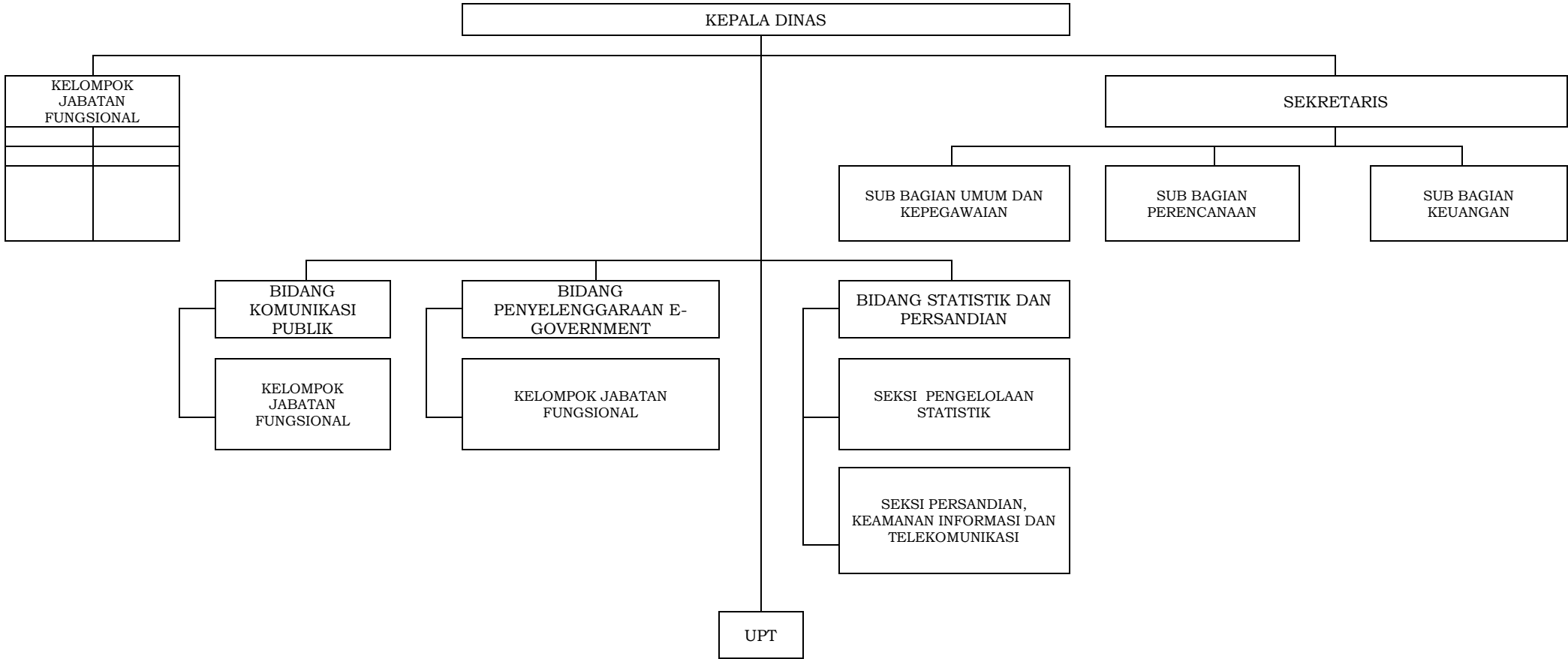
1.2 Gambaran Umum SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



Susunan Organisasi beserta uraian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Perencanaan;
 - 2). Sub Bagian Keuangan; dan
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengelolaan Statistik; dan
 - 2). Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPT Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;

- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, anggaran, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Sub Bagian Keuangan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran kas, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bidang Komunikasi

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
 - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
 - f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang Penyelenggaraan *E-Government*;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.
- (2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
 - b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas:

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

Seksi Pengelolaan Statistik

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

Seksi Persandian

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

b) Kepegawaian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai jumlah PNS sebanyak 20 (dua puluh) orang. Untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sumber daya manusia/susunan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 40 orang yang terdiri dari 20 orang ASN dan 20 orang Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Bidang Komunikasi	: - orang
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	: 1 orang
Kepala Bidang Statistik dan Pesandian	: 1 orang
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
Kepala Seksi Pengelolaan Statistik	: 1 orang
Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	: 1 orang
Staf Pelaksana/Fungsional	: 12 orang

Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT) : 20 orang

Susunan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan ruang:

Golongan IV

- a. Golongan IV/c : - orang
- b. Golongan IV/b : 2 orang
- c. Golongan IV/a : 2 orang

Golongan III

- a. Golongan III/d : 2 orang
- b. Golongan III/c : 5 orang
- c. Golongan III/b : 1 orang
- d. Golongan III/a : 2 orang

Golongan II

- a. Golongan II/d : 2 orang
- b. Golongan II/c : 1 orang
- c. Golongan II/b : - orang
- d. Golongan II/a : 1 orang

Golongan IX

- a. Golongan IX : 2 orang

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.1 Tebel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SD/MI	-	
2.	SLTP/MTs	-	
3.	SLTA/SMK	2	
4.	D.III	4	
5.	S1/D.IV	10	
6.	S2	4	
	Jumlah	20	

c) Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana umum sebagai berikut:

Tabel 1.2.2

Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG	KETERANGAN	TAHUN PENGADAAN
1	Portable Generating Set	1	Baik	Genset Radio Tuntung Pandang	2015
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Baik	Mobil operasional Kepala Dinas dan mobil operasional Dinas dan mobil operasional Radio Tuntung Pandang FM	2019, 2014, 2014
3	Sepeda Motor	6	Cukup baik	Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas	2014
4	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6	Baik	Berupa penangkal petir beserta perlengkapannya pendukungnya, tower jaringan ukuran sedang, plat besi/dak cor pelindung kabel	2015
5	Perkakas Standar Lain-lain	14	Baik	Harness, carabiner, tali karmantel, Bag Pack, mini katrol (pulley), figure 8	2015
6	Perkakas Khusus Lain-lain	38	Baik	Digital multimeter, LAN tester digital, bor baterai combo, harness/sabuk pengaman, Bag pack (tas peralatan), portabel iron solder, obeng set, tespen, obeng	2015

				listrik, kunci inggris, kunci sock, kunci ring all pas size, Tang set, Kunci L Panjang, Crimping Tool RJ11/RJ45, pemotong kabel, Toolbox, helmet, Headlamp	
7	Lemari Besi	10	Baik	Lemari arsip	2017, 2024
8	Rak Besi/Metal	10	Baik	rackmount untuk penyimpan radio station, Rack Server 42/48 U, Rack Server 18/22 U, Rak besi arsip	2015
9	Filling Besi/Metal	4	Baik	Filling Kabinet Tingkat 4 (Empat)	2017
10	Brank Kas	1	Baik	-	2010
11	Kardek Besi/Metal	2	Baik	Locker 5 laci	2013
12	Papan Visual/Running Teks	4	Baik	running text, Runing text mobil Radio tuntung pandang, Neon box mobil radio tuntung pandang	2014, 2024
13	Papan Nama Instansi	1	Baik	-	2018
14	Papan Pengumuman	8	Baik	untuk pemberitahuan kawasan free wifi	2018
15	Mesin Absensi	93	Baik	Mesin Absensi untuk menunjang pelaksanaan kehadiran pegawai di SKPD	2019
16	Genset	2	Baik		2015
17	Mesin Pompa Air	1	Baik	-	2015
18	Papan Nama Ruangan/Jabatan	12	Baik	-	2018
19	Papan Nama Lainnya	1	Baik	Papan nama Radio Tuntung Pandang	2014
20	Meja Kayu	10	Baik	meja kerja	2013
21	Meja Rapat	5	Baik	Meja rapat	2017, 2023
22	Meja Panjang	1	Baik	Meja Jati Panjang 3m + Kursi	2015
23	Bangku Tunggu	2	Baik	Bangku tunggu	2015
24	Kursi Lipat	31	Baik	Kursi lipat	2018, 2024
25	Meja Komputer	2	Baik	-	2018
26	Sofa	3	Baik	-	2016, 2024
27	Kursi Kerja	36	Baik	Kursi kerja eselon dan staf	2017
28	Meja Kerja	12	Baik	-	2017, 2024
29	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik	-	2015

30	AC Split	15	Baik	-	2017, 2019, 2023, 2024
31	Exhaust Fan	1	Baik	-	2018
32	Televisi	2	Baik	untuk di Bidang E Government	2019
33	Microphone	1	Baik	Mikropon Siaran Warna Silver	2019
34	Microphone Table Stand	6	Baik	Mikropon meja berdiri	2019
35	Tandon Air	1	Baik	-	2018
36	Tabung Pemadam Api	2	Cukup baik	-	2019
37	Mainframe	3	Baik	Server data high end, server 16 GB Ram, 2 x 1 TB	2019
38	Personal Komputer Lain-lain	4	Baik	Management Routing, wire management, Switch (Workgroup Switches, 48 10/100/1000, 2 T/SFP LAN), H/W Firewall	2015
39	P.C Unit/ Komputer PC	22	Baik	-	2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024
40	Laptop	25	Baik	-	2017, 2019, 2020, 2023, 2024
41	Personal Komputer Lain-lain	5	Baik	untuk pemetaan dan desain grafis, load balancing	2019
42	Hard Disk	4	Baik	Hardisk server	2019
43	Monitor	3	Baik	LCD Monitor	2019, 2023
44	Printer	21	Baik	-	2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024
45	UPS	7	Baik	UPS Rackmount non expandable, UPS/Stabilizer-Informasi, UPS 10.000 VA + Railing Kit + Battery Pack	2019
46	Stabilizer/Stavolt	5	Baik	Stabilizer / INFORMASI	2019, 2024
47	Harddisk Eksternal	4	Baik	meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual	2019
48	Memory	2	Baik	untuk meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual, SSD	2019

49	Router	67	Baik	PC Bridge, Router 16 Core CPU, Omni Router, Backup Router	2019
50	Modem	21	Baik	perlengkapan sms broadcast/gateway dan MODEM BID.EGOV TH 2018	2018
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	6	Kurang Baik	perlengkapan sms broadcast/ gateway, jaringan FO feeder, perlengkapan, dan jasa instalasinya, jaringan intranet, perlengkapan, dan instalasinya, print server	2018
52	Tiang Antena	7	Baik	Tiang Hotspot	2018
53	Radio Access Point	37	Baik	Sollar cell Hotspot, Radio point multi, Radio Point to Point (Station recieve dan wds) Radio Point to Point (Station recieve dan wds) Radio point to point(station recieve dan wds)	2018
54	Antena	5	Kurang baik	antena omni jaringan penunjang e- governm	2015
55	Switch Hub	23	Baik	-	2017
56	Wireless Access Point	8	Baik	Wireless Station 5 Ghz (outdoor)	2017, 2023
57	Anti Petir/Ground Jaringan	1	Baik	-	2019
58	Proyektor + Attachment	1	Baik	water wall & proyektor	2015
59	Telephone Hybird	1	Kurang Baik	IP Phone	2015
60	Headphone	20	Baik	-	2015, 2024
61	Microphone/Wireless Mic	10	Baik	-	2019, 2023, 2024
62	Professional Sound System	3	Kurang Baik	Sound Sistem	2016
63	Microphone Table stand	6	Kurang Baik	-	2016
64	Handycam	2	Baik	-	2019, 2024
65	Stand Microphone	5	Cukup Baik	-	2019
66	Televisi	2	Baik	-	2019, 2024
67	Camera Electronic	3	Baik	-	2019
68	Amplifier	1	Baik	Amplifier	2019
69	Loudspeaker	2	Baik	speaker	2019
70	Handy Talky	8	Baik	-	2019
71	Handphone	5	Baik	-	2019

72	Sound System	2	Baik	-	2019, 2024
73	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	2	Baik	-	2019
74	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	3	Cukup Baik	Tabung Pemancar Radio Tuntung Pandang FM dan Exiter Pemancar Radio	2019
75	Program Input Equipment Lain-lain	1	Baik	Exiter	2019
76	CCTV	1	Baik	TEKNOLOGI DIGITAL SECURITY DI TITIK RAWAN KAMTIBMAS	2018
77	CCTV	2	Baik	cctv 8 channel	2020, 2023
78	Tabung Pemadam Api	2	Baik	-	2020
79	Stand Microphone	5	Baik	-	2020
80	Meja Siaran	3	Baik	-	2020
81	Kursi Staf	26	Baik	-	2020, 2023
82	Air Conditioner 1 PK	4	Baik	-	2020
83	Air Conditioner 1,5 PK	1	Baik	-	2020
84	Kipas Angin	2	Baik	-	2020
85	Televisi LED TV 40 inch	1	Baik	-	2020
86	Scanner	3	Baik	-	2020, 2023
87	Meja Kerja	1	Baik	-	2020
88	Kursi Kerja	5	Baik	-	2020, 2024
89	Kursi Tamu	1	Baik	-	2020
90	Layar Proyektor 120"	1	Baik	-	2020
91	Layar Proyektor 96"	1	Baik	-	2023
92	Alat pengontrol temperatur/suhu ruangan	1	Baik	-	2020
93	Drone	1	Baik	-	2021
94	Kamera Video	4	Baik	-	2021
95	Video Capture	2	Baik	-	2021
96	Tangga Teleskopik	1	Baik	-	2021
97	Bracket TV up to 65 Inch	2	Baik	-	2021
98	Alat Pemadam Api Ringan Fireball	6	Baik	-	2021
99	Alat Pemadam Api Ringan Tabung	1	Baik	-	2021
100	UPS 30 Kva (include Modular Battery Cabinet, Battery String)	1	Baik	-	2021
101	MEMORY (RAM) 8 GB DDR4	1	Baik	-	2021
102	Hardisk eksternal 2 TB	1	Baik	-	2021
103	Perangka Jaringan Lainnya	1	Baik	Cloud Core Router, Access Point SKPD, Switch Hub,	2021

				Splitter 1:4 Optical Distribution Point, Splitter 1:8 Optical Distribution Point, Optical Network Termination (ONT)	
104	Jaringan Fiber Optik Antar SKPD	1	Baik	-	2020
105	Rackmount	4	Baik	-	2020, 2023
106	FO Toolkit	1	Baik	-	2020
107	Perangkat Video Conference	2	Baik	-	2020
108	Perangkat Keamanan Ruang NOC	1	Baik	CCTV dan Alarm	2020
109	Panel listrik ruang NOC	1	Baik	-	2020
110	Aplikasi penunjang E- Government	10	Baik	-	2020, 2023
111	Komputer Tablet	1	Baik	-	2020
112	UPS 6000 VA	1	Baik	-	2020
113	Magnetic Switch 220 V	2	Baik	-	2020
114	Peralatan Studio Video dan Film	1	Baik	-	2020
115	Alat Komunikasi Radio VHF	1	Baik	-	2020
116	UPS Standar 1200 V	1	Baik	-	2023
117	Routerboard	1	Baik	-	2023
118	Artificial Plant	2	Baik	-	2023
119	Bracket Monitor Video Wall	16	Baik	-	2023
120	Interior Command Center	1	Baik	-	2023
121	Kursi Deret Ruang Peninjau	2	Bak	-	2023
122	Kursi Rapat	6	Baik	-	2023
123	Kursi VVIP	1	Baik	-	2023
124	Meja Kendali	1	Baik	-	2023
125	Meja Operator Melengkung	1	Baik	-	2023
126	Meja Pemantau CCTV	1	Baik	-	2023
127	Televisi LED TV 65 inch	2	Baik	-	2023
128	Apar Powder	1	Baik	-	2023
129	Ceiling Speaker	4	Baik	-	2023
130	Clip On microphone	1	Baik	-	2023
131	Meja Call Centre & Pengolahan Data uk 120x60	3	Baik	-	2023
132	Microphone Chairman unit	1	Baik	-	2023
133	Microphone delegate unit	4	Baik	-	2023
134	Video Processor Board Output HDMI 4 chanel	4	Baik	-	2023
135	Volume Control Ruangan	3	Baik	-	2023

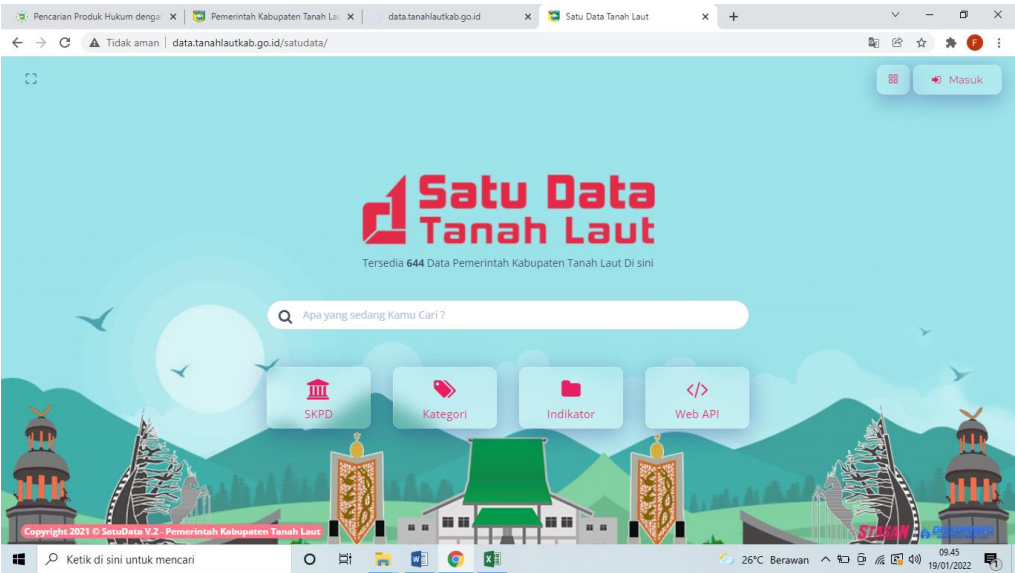
136	HDMI Extender Reciever dan Sender	30	Baik	-	2023
137	HDMI Splitter	16	Baik	-	2023
138	Kabel HDMI	30	Baik	-	2023
139	Kabel UTP	16	Baik	-	2023
140	LCD/LED Video Wall Sektor Utama dan Sekunder	14	Baik	-	2023
141	Mobile Video Conference	1	Baik	-	2023
142	Sistem Audio (channel Audio Mixer)	2	Baik	-	2023, 2024
143	Video Controller 4U Chasis 11 Slot	1	Baik	-	2023
144	Video Processor Board Input HDMI 4 chanel	1	Baik	-	2023
145	UPS 10000 VA PC Unit Operator dan	1	Baik	-	2023
146	Pengendali Command Center	7	Baik	-	2023
147	Eksternal Webcam Operator Command Center	7	Baik	-	2023
148	Headset	7	Baik	-	2023
149	LED/LCD 22 inchi Touchscreen	3	Baik	-	2023
150	LED/LCD Monitor	13	Baik	-	2023
151	LCD Proyektor	1	Baik	-	2024
152	Dry Cabinet	1	Baik	-	2024
153	Pembagi output phone mixer	1	Baik	-	2024
154	Kamera Mirrorless	1	Baik	-	2024
155	Video Tron	1	Bak	-	2024
156	Gimbal/Stabilizer	1	Baik	-	2024

Sumber Daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Jaringan Intra antar SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
2. Akses Internet terpadu Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
3. Ruang *Network Operation Center* (NOC);
4. Gedung Command Center Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
5. Akses komunikasi dengan 1 unit tower pemancar radio dan jaringan;
6. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
8. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut.

d) Data statistik

Data statistik yang dapat disajikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut adalah data statistik lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dikelola melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut (<https://data.tanahlautkab.go.id/>).



BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

2.1 Urusan Wajib

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Dinas yang melaksanakan urusan wajib yakni urusan Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian.

2.1.1 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas yang tidak termasuk dalam Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

2.1.2 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Kesesuaian perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Renstra dan Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2 Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2024

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp)		KET.
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
1	- Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Y	Persentase pencapaian domain SPBE	Y	IKU		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	- Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	- Persentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Y							

						1					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Persentase terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah	Y	4.213.954.566		
2							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	Y							
						2					Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	Persentase terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Y	3.901.586.388		
						3					Pengelolaan e-governmen Di Lingkup Pemerintah Daerah	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	Terlaksananya pemenuhan pengelolaan e-Governmen t di Lingkup	Y	104.400.000		

										Kabupaten/Kota		Pemerintah Daerah Kabupaten					
3			-				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase terselenggaranya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Y							
			-			4					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Persentase terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Y	88.484.570		
4							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi								
						5					Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	SKPD Lingkup Kabupaten Tanah Laut	Jumlah layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Y	209.364.424		

											h daerah kabupate n/kota						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Y	IKU					T							
5							Program Penunjang Urusan Pemerinta han DaerahKa bupaten/ Kota		IKM sekretariat Diskominfo								
						6					Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP SKPD	-	2.942.225		
						7					Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP SKPD	-	4.062.544.8 66		

						8					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	30.000.000		
						9					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase terlaksananya pemenuhan umum perangkat daerah	-	646.390.825		
						10					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	-	170.001.949		
						11					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase terlaksananya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	1.483.240.076		
						12					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-	137.715.800		
													JUMLAH		15.050.625.689,-		

2.1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 seluruhnya bersumber dari APBD/APBD-P tidak ada dari APBN. Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3 Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.979.315	SILPA
1.2			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	962.910	SILPA
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.058.545.453	-DAU -DAU Tambahan Dukungan Pendanaan PPPK -SILPA
2.2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.999.413	SILPA
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.1			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.594.083	SILPA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
3.2			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	194.064.669	SILPA
3.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.933	SILPA
3.4			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.999.622	SILPA
3.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	5.400.000	SILPA
3.6			Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	SILPA
3.7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.095.000	SILPA
3.8			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	237.518	SILPA
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4.1			Pengadaan Mebel	49.979.442	SILPA
4.2			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.557.507	SILPA
4.3			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.465.000	SILPA
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.000.000	SILPA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
5.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.240.076	SILPA
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.300.000	SILPA
6.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.815.800	SILPA
6.3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.600.000	SILPA
6.4			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000	SILPA
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
7.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
7.1			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	21.996.500	SILPA
7.2			Pengelolaan konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	50.000.000	SILPA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
7.3			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.188.320.000	SILPA
7.4			Pelayanan Informasi Publik	351.550.000	SILPA
7.5			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	29.981.828	SILPA
7.6			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1.572.106.238	SILPA
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
8		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
8.1			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.901.586.388	SILPA
9		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
9.1			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	104.400.000	SILPA
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
10		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			
10.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.584.570	SILPA
10.2			Membangun Metadata Statistik Sektoral	28.400.000	
10.3			Pengembangan Infrastruktur	40.500.000	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
11		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
11.1			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.636.786	SILPA
11.2			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	166.727.638	SILPA
Jumlah				15.050.625.689	

2.1.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4 Tabel alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian Kinerja	Sisa Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.532.835.741	5.537.415.628	84,76	995.420.113	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.942.225	2.750.000	93,47	192.225	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.979.315	1.850.000	93,47	129.315	APBD
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.942.225	2.750.000	93,47	62.910	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.544.866	3.297.628.438	81,17	764.916.428	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.058.545.453	3.294.111.538	81,16	764.433.915	APBD
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.999.413	3.516.900	87,94	482.513	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	29.200.000	97,33	800.000	APBD
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	29.200.000	97,33	800.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.390.825	609.669.695	94,32	36.721.130	APBD
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.594.083	6.777.000	89,24	817.083	APBD
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	194.064.669	181.051.800	93,29	13.012.869	APBD
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.933	9.110.000	91,10	889.933	APBD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.999.622	11.293.200	75,29	3.706.422	APBD
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.560.000	84,44	840.000	APBD
	- Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	14.800.000	98,67	200.000	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.095.000	381.877.695	95,69	17.217.305	APBD
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	237.518	200.000	84,20	37.518	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.001.949	158.139.525	93,02	11.862.424	APBD
	- Pengadaan Mebel	49.979.442	43.858.125	87,75	6.121.317	APBD
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.557.507	26.280.000	88,91	3.277.507	APBD
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.465.000	88.001.400	97,28	2.463.600	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.483.240.076	1.322.776.867	89,18	160.463.209	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.000.000	177.732.260	70,25	75.267.740	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan	1.230.240.076	1.145.044.607	93,07	85.195.469	APBD

	Umum Kantor					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.715.800	117.251.103	85,14	20.464.697	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.300.000	31.331.003	94,09	1.968.997	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.815.800	60.021.100	95,55	2.794.700	APBD
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.600.000	16.200.000	82,65	3.400.000	APBD
	- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000	9.699.000	44,09	12.301.000	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.213.954.566	4.042.796.794	95,94	171.157.772	APBD
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.525.009.634	3.158.421.719	89,60	171.157.772	APBD
	- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	21.996.500	15.990.000	72,69	6.006.500	APBD
	- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	50.000.000	37.310.000	74,62	12.690.000	APBD
	- Pengelolaan Media Komunikasi publik	2.188.320.000	2.101.396.989	96,03	86.923.011	APBD
	- Pelayanan Informasi Publik	351.550.000	297.429.305	84,61	54.120.695	APBD
	- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	29.981.828	23.150.500	77,22	6.831.328	APBD
	- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1.572.106.238	1.567.520.000	99,71	4.586.238	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.005.986.388	3.846.351.500	96,02	159.634.888	APBD
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.901.586.388	3.757.251.500	96,30	144.334.888	APBD
	- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.901.586.388	3.757.251.500	96,30	144.334.888	APBD
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	104.400.000	89.100.000	85,34	15.300.000	APBD
	- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	104.400.000	89.100.000	85,34	15.300.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	88.484.570	74.789.320	84,52	13.695.250	APBD
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	88.484.570	74.789.320	84,52	13.695.250	APBD
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.584.570	19.582.570	99,99	2.000	APBD
	- Membangun Metadata	28.400.000	21.706.750	76,43	6.693.250	APBD

		Statistik Sektoral					
		- Pengembangan Infrastruktur	40.500.000	33.500.000	82,72	7.000.000	APBD
5		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	209.364.424	189.100.000	90,32	20.264.424	APBD
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.364.424	189.100.000	90,32	20.264.424	APBD
		- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.636.786	40.515.000	95,02	2.121.786	APBD
		- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	166.727.638	148.585.000	89,12	18.142.638	APBD
		JUMLAH	15.050.625.689	13.690.453.242	90,96	1.360.172.447	

2.1.5 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5 Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	Terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp 764.433.915,- yang disebabkan adanya kekosongan pejabat pimpinan tinggi pratama (kadis) Diskominfo selama 9 bulan serta pejabat Kepala Bidang	Telah ada penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Pimpinan Tinggi Diskominfo oleh Bupati Tanah Laut selama 9 bulan. Terkait kekosongan pejabat Kepala Bidang Komunikasi pada telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.).	

						Komunikasi selama 12 bulan.		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	5 orang			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	-	-	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	-	-	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen			
			Penyediaan Bahan/Material	2 Paket	2 Paket			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	-	-	
			Penatausahaan Arsip	100	100			

				Dinamis pada SKPD	dokumen	dokumen			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Pengadaan Mebel	31 unit	31 unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	8 Unit	8 Unit	-	-	

					Operasional atau Lapangan					
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit	-	-	
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit			
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen			
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen			-
				- Perbup Nomor 153 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	Pelayanan Informasi Publik	120 Dokumen	120 Dokumen	Belum optimalnya pengelolaan PPID	Diskominfo perlu melakukan sosialisasi kepada semua OPD dilingkungan Pemkab Tanah laut terkait dengan pengelolaan website PPID setiap triwulan sebagai dukungan terhadap keterbukaan informasi publik.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi publikasi Daftar Informasi Publik pada website PPID setiap semester, telah dilakukan bimbingan teknis pengelolaan website PPID kepada operator website PPID pada

			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	Adanya kondisi blankspot internet di beberapa titik di Kabupaten Tanah Laut.	- Diskominfo akan mengalokasikan perencanaan jangka panjang terhadap pembuatan tower induk untuk mengcover area blankspot jaringan di beberapa wilayah dan Desa se-Kabupaten Tanah Laut. - Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait penyediaan layanan internet menggunakan jaringan lastmile. - Rencana pembuatan master plan data blank spot dengan cakupan wilayah spot se-Kabupaten Tanah Laut.	Diskominfo perlu mengalokasikan perencanaan jangka panjang terhadap pembuatan tower menara telekomunikasi induk untuk mengcover area blankspot jaringan di beberapa wilayah dan Desa se-Kabupaten Tanah Laut.
			Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis			-		

					Elektronik					
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Unit	3 Unit	-		
2	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	-		
					Membangun Metadata Statistik Sektoral	5 Dokumen	5 Dokumen			
					Pengembangan Infrastruktur	1 unit	1 unit			
3	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
			- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Tahun 2019 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 211 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	-		

2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6 Permasalahan dan Solusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
1.	Sekretariat	Tidak ada permasalahan yang mendasar, kegiatan berjalan baik, secara fisik sudah hampir terlaksana seluruhnya 100%, sisa anggaran karena efesiensi	-	
2.	Bidang Komunikasi	Kegiatan fisik telah terlaksana seluruhnya 100% namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Penggunaan layanan LAPOR oleh masyarakat masih belum maksimal. 2. Kurangnya tenaga jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan. 3. Masih belum maksimalnya fungsi PPID dan PPID Pembantu dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik. 4. Kurangnya SDM admin pengelola informasi di SKPD sehingga pengelolaan informasi melalui PPID belum maksimal.	1. Melakukan Sosialisasi LAPOR kepada masyarakat melalui kegiatan manunggal Tuntung Pandang, siaran radio, Media Sosial dan pemberdayaan KIM. 2. Menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui website: 1. http://ppid.tanahlautkab.go.id 2. http://portal.tanahlautkab.go.id 3. Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM dalam pengelolaan Infomasi publik. 4. Melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk menyamakan persepsi terkait daftar informasi publik dan kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.	
3.	Bidang Penyelenggaraan E-Government	Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% secara fisik dan kinerja namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Kecamatan selain	1. Perlu pembangunan Tower bersama untuk memberikan layanan kepada kecamatan yang belum terkoneksi	

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
		Kecamatan Pelaihari belum terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. 2. Tenaga Teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan terbatas. 3. Kebutuhan Tenaga Teknis Pengembangan Aplikasi Belum Seimbang dengan jumlah kebutuhan permintaan pengembangan aplikasi.	dengan jaringan Pemerintah Kabupaten. 2. Penambahan tenaga teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan. 3. Perlu penambahan tenaga teknis khusus yang membidangi pengembangan aplikasi.	
4.	Bidang Statistik dan Persandiaan	Kegiatan telah terlaksana seluruhnya 100% secara fisik dan kinerja namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Masih belum lengkapnya Data Statistik Sektorial yang Disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan satu data indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan masih belum mengertinya Admin SKPD dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD. 2. Modul aplikasi sistem tanda tangan elektronik (TTE) yang telah berjalan baik namun belum dimanfaatkan secara optimal.	1. Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada aplikasi satu data tanah laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut. 2. Perpanjangan Kerjasama atas penerapan tanda tangan elektronik di Kabupaten Tanah Laut.	

2.1.7 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.7 Kebijakan Stategis yang diambil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pengoptimalan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut.	Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan Nilai/Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).

2	Pemanfaatan Aplikasi Satu Data Tanah Laut.	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/151-KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektor Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2022	Tersedianya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan pertimbangan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.
3	Pengelolaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Media Massa	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Media Massa	Tersedianya dasar hukum sebagai acuan standar penetapan syarat kerja sama publikasi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Media Massa.
4	Penyelenggaraan layanan dan program siaran melalui live dan streaming pada LPPL Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan layanan dan program siaran melalui live dan streaming pada LPPL Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM	Upaya peningkatan pengembangan program kerja dan nilai tambah bagi layanan yang diberikan oleh LPPL Radio Tuntung Pandang FM dan mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan perilaku masyarakat sebagai pendengar untuk berperan serta dan mendukung program pembangunan pemerintah dan lembaga lainnya. Fungsi layanan siaran adalah sebagai pengembangan media program siaran LPPL Radio Tuntung Pandang FM bagi publik/masyarakat untuk optimalisasi pelayanan informasi.
5	Pemanfaatan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 211 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik	Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2024 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut di Tahun 2024

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar mengkaji dan membaca potensi pendapatan daerah dengan adanya Videotron yang telah dianggarkan di Tahun 2023 dan mencari referensi untuk perhitungan tarif atau biaya sewa yang ideal dan dapat memberikan pendapatan daerah.	- Videotron Diskominfo telah difungsikan sebagai sarana publikasi pembangunan daerah dan promosi berbagai program maupun iklan layanan masyarakat. - Diskominfo akan segera melakukan kaji tiru ke beberapa wilayah, terutama yang telah memiliki peraturan daerah terkait retribusi videotron.	- Dengan jumlah videotron yang masih sedikit, maka prioritas sementara adalah publikasi dan promosi program unggulan daerah agar dapat diketahui masyarakat. - Diskominfo akan mengkaji penambahan jumlah videotron dan lokasi-lokasi strategis agar apabila Perda retribusi videotron telah diterbitkan akan menarik minat pemasang iklan.
2.	Diskominfo segera berkoordinasi dengan DPRKPLH terkait aset Videotron yang masih menjadi aset DPRKPLH agar dikembalikan sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya dilakukan pencatatan aset serta serah terima untuk dapat dikelola Diskominfo.	- Telah dilakukan koordinasi awal dengan DPRKPLH dan BPKAD terkait peralihan aset videotron ke Diskominfo. - Aset videotron yang dialihkan pengelolaannya ke Diskominfo sebaiknya dalam kondisi baik saat penyerahan agar dapat difungsikan secara maksimal.	- Kondisi aset videotron DPRKPLH adalah rusak sedang, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar bisa difungsikan dengan baik. - Diskominfo telah menganggarkan biaya pemeliharaan videotron untuk Tahun Anggaran 2025, sehingga apabila hingga akhir tahun 2024 masih dalam kondisi rusak, maka Diskominfo bisa melakukan perbaikan aset tersebut.
3.	Diskominfo agar melakukan peninjauan dan pendampingan kepada LPPL untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi belanja LPPL apakah dialokasikan di belanja modal Diskominfo atau dialihkan dalam bentuk belanja hibah yang dikelola oleh LPPL tersebut	- Diskominfo bersama SKPD terkait telah melakukan FGD bersama pihak Kemendagri, Kemkominfo, KPI Pusat terkait pengelolaan LPPL. - Telah dilakukan penganggaran untuk Tahun 2025 dalam bentuk hibah kepada LPPL.	- Dari FGD tersebut, disepakati pengelolaan keuangan akan diserahkan kepada manajemen LPPL. - Diskominfo akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan hibah yang dilakukan LPPL.
4.	Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat atas penghapusan retribusi menara telekomunikasi di Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya, maka perihal tersebut Diskominfo harus melakukan upaya untuk memaksimalkan peluang potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Diskominfo baik itu seperti pengelolaan pendapatan daerah melalui penyewaan videotron untuk layanan iklan maupun pendampingan kepada LPPL yang berada dibawah Diskominfo.	- Penyewaan atau iklan pada videotron akan menjadi salah satu potensi pendapatan daerah yang bisa dikelola Diskominfo. - Selain itu pendapatan iklan melalui LPPL juga akan memiliki potensi tersebut.	- Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dan penetapan peraturan daerah terkait retribusi videotron. - Dengan metode pengelolaan keuangan secara hibah melalui Diskominfo kepada LPPL, maka potensi pendapatan yang timbul juga akan menjadi kewenangan LPPL dalam pengelolaannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, maupun tugas pembantuan kepada desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Daerah

4.1.1 Mitra yang Diajak Kerjasama

- a. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan kerjasama dengan Balai Sertifikat Elektronik Badan Sandi dan Siber Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

4.1.2 Dasar Hukum

- a. Dasar hukum dalam melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Balai Sertifikat Elektronik Badan Sandi dan Siber Negara adalah Dokumen Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 100.2.2/19/PKS-PEMTALA/2023 dan Nomor: PERJ.637/BSSN/BS/HK.07.02/09/2023.

4.1.3 Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilaksanakan adalah Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

4.1.4 Nama Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan bersumber dari APBD Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp 166.727.638,-.

4.1.6 Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan Para Pihak.

4.1.7 Hasil (output) dari Kerjasama

Hasil dari adanya kerjasama ini adalah tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada system elektronik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, penerbitan Sertifikat Elektronik, pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

4.1.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang mungkin timbul yaitu dalam hal terjadinya perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2024-2026 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan akhir tahun anggaran 2024.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektivaskan kembali kinerja serta komitmen dalam rangka mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

- Penerbitan Surat Tanda Registrasi TALAKAB-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) oleh Kepala BSSN kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

